

SASARAN I

Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Sasaran strategis pertama pada Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah terdiri dari dua indikator yang diampu oleh Bidang Anggaran Daerah, Bidang Perbendaharaan dan Bidang Pengelolaan Aset Daerah. Secara sederhana, tingkat capaian kinerja pada sasaran pertama dapat kita dilihat pada tabel berikut:

Tabel Capaian Kinerja BPPKAD pada Sasaran Strategis 1

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	2024		
		TARGET	REALISASI	CAPAIAN
Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah	Persentase OPD yang Melaksanakan Tata Kelola Keuangan Sesuai Ketentuan	100%	100%	100%
	Persentase Data Aset yang Akurat	99,99%	99,67%	99,68%

Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah merupakan sasaran strategis pertama pada Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gresik. Pada sasaran pertama ini, titik fokus kerjanya ada pada bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah dengan program pengelolaan keuangan daerah dan program pengelolaan barang milik. Indikator pertama yaitu Persentase OPD yang melaksanakan tata kelola keuangan sesuai ketentuan merupakan indikator yang bertujuan untuk mengukur sejauh mana progres kinerja pengelolaan keuangan, baik dari segi penganggaran, pencairan sampai pelaporan pertanggungjawaban keuangan sedangkan indikator kedua yaitu Persentase data aset yang akurat dengan tujuan untuk mengetahui pencapaian dari progres penatausahaan aset daerah mulai dari hal pencatatan, pengelolaan hingga pelaporan barang milik daerah.

Pelaksanaan tata kelola keuangan pemerintah daerah merupakan suatu kegiatan yang telah diikuti oleh seluruh Perangkat Daerah. Hal ini dapat dilihat pelaksanaan rekonsiliasi setiap bulan yang selalu diadakan oleh bidang perbendaharaan guna memantau jalannya pengelolaan keuangan Perangkat Daerah. Selain rekonsiliasi setiap bulan, kegiatan yang mendukung pengelolaan keuangan daerah juga dilaksanakan melalui koordinasi dan sosialisasi yang dilaksanakan oleh bidang anggaran.

Dalam mengatasi kendala-kendala yang ada, BPPKAD melakukan beberapa upaya menyelesaikan kendala-kendala yang dialami tentunya Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah kabupaten Gresik akan menerapkan beberapa upaya dalam pelaksanaan kinerja pada tahun berikutnya agar menjadi lebih baik lagi, yaitu :

1. Melaksanakan sosialisasi kebijakan akuntansi dan penyusunan modul Laporan Keuangan secara berkala;
2. Melaksanakan pembinaan dan monitoring terkait penatausahaan keuangan pada perangkat daerah;
3. Meningkatkan tertib administrasi dalam pengelolaan keuangan daerah;
4. Meningkatkan intensitas rekonsiliasi aset dengan perangkat daerah secara periodik (baik setiap triwulan maupun setiap semester);
5. Meningkatkan koordinasi yang lebih baik lagi dengan perangkat daerah selaku penanggungjawab BMD (Barang Milik Daerah) sebagai bentuk kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku;
6. Meningkatkan koordinasi yang intens dengan pihak DJKN (Direktorat Jenderal Kekayaan Negara) Kantor Wilayah Jawa Timur.



SASARAN II

Meningkatnya Pendapatan Daerah

Pada sasaran strategis kedua ini terdapat satu indikator yang diampu oleh bidang pendapatan, yaitu Bidang pendataan, Bidang Penetapan dan Bidang Penagihan. Untuk mengukur tingkat pencapaian sasaran ini dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel Capaian Kinerja BPPKAD pada Sasaran Strategis 2

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	2022		
		TARGET	REALISASI	CAPAIAN
Meningkatnya Pendapatan Daerah	Pertumbuhan Realisasi Pendapatan Daerah	3,49%	9,19%	263,37%

Meningkatnya pendapatan daerah merupakan sasaran strategis kedua pada Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gresik. Pada sasaran kedua ini, titik kinerjanya ada pada bidang pendapatan dengan program pengelolaan pendapatan daerah. Indikator pada sasaran kedua ini adalah Pertumbuhan Realisasi Pendapatan Daerah merupakan indikator yang bertujuan meningkatkan realisasi pendapatan daerah.

Dalam melaksanakan upaya untuk mengetahui sejauh mana progres pertumbuhan realiasi pendapatan yang telah dicapai terhadap target yang telah ditentukan ada beberapa hal yang mempengaruhi, baik yang menjadi pendukung maupun penghambat. Faktor-faktor pendukung optimalisasi pajak daerah antara lain :

1. Sumber Daya Manusia;
2. Kerjasama yang baik antar bidang maupun instansi;
3. Hubungan kemitraan yang baik dengan masyarakat;
4. Himbauan pembayaran pajak melalui media cetak, media elektronik dan media sosial.

Sedangkan faktor-faktor penghambat optimalisasi pajak daerah antara lain :

1. Kesadaran masyarakat untuk membayar pajak yang masih rendah;
2. Kondisi perekonomian masyarakat Kabupaten Gresik yang belum menentu akibat pandemi;
3. Tidak terealisasinya penagihan secara langsung dari lapang ke lapangan akibat pembatasan.

Upaya-upaya yang telah dilaksanakan antara lain:

1. Intensifikasi dengan peningkatan kualitas pelayanan terhadap Wajib Pajak dan menyusun sistem informasi dan prosedur pengelolaan pajak daerah;
2. Melaksanakan penggalan potensi sumber-sumber pendapatan daerah khususnya pajak daerah;
3. Optimalisasi pendaftaran Wajib Pajak baru dan pemeriksaan tarif pajak.
4. Memaksimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui potensi pajak daerah yang ada agar bisa mencapai indeks kemandirian fiskal yang diinginkan / sangat mandiri.

Pelayanan masyarakat merupakan hal utama yang telah menjadi prioritas instansi untuk memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat. Berbagai upaya pelayanan untuk mempermudah wajib pajak dan objek pajak pembayaran, pengelolaan yang berkaitan dengan Pajak Daerah maupun PBB dan BPHTB terus ditingkatkan melalui pengembangan berbagai inovasi.

